

**PENGARUH SEKTOR PARIWISATA DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PAD DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

I Putu Ricky Mahesa Fernanda ¹

Ni Putu Martini Dewi ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan industri yang selalu mengalami pembangunan, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tujuan penelitian (1) menganalisis pengaruh sektor pariwisata dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2) menganalisis pengaruh sektor pariwisata, retribusi daerah dan PAD terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (3) menganalisis bahwa PAD memediasi pengaruh sektor pariwisata, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan, dengan teknik analisis jalur dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sektor pariwisata berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sektor pariwisata dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. PAD memediasi secara parsial pengaruh retribusi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan PAD tidak memediasi secara parsial pengaruh sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata Kunci: *Sektor Pariwisata, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja*

ABSTRACT

The tourism sector is industry always experiencing development, so that it can increase employment. The research objective (1) analyze influence of tourism sector and local fees on PAD districts / cities Bali Province. (2) analyze influence of tourism sector, regional levies and PAD on absorption of labor districts / cities Bali Province. (3) analyze PAD mediates influence of tourism sector, regional levies and local revenue in districts / cities Bali Province. The method used non-participant, with path analysis and secondary data. The results this study indicate the tourism sector has positive and insignificant effect on PAD in the Regency / City Bali Province, while the local levies don't have significant positive effect on local income in Regency / City of Bali Province. The tourism sector and PAD have significant positive effect on employment in Regency / City of Bali Province, while the local levy no significant positive effect on labor absorption in the Regency / City Bali Province. PAD partially mediates the effect of local user fees on labor absorption, while PAD doesn't partially mediate the influence of tourism sector on labor absorption in Regency / City Bali Province.

Keywords: *Tourism Sector, Regional Retribution, Original Local Revenue, Labor Absorption*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Suparmoko, 1992). Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Pembangunan dapat diartikan juga proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara adalah tercapainya pembangunan ekonomi yang adil dan merata, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2006).

Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan pada struktur permintaan serta penawaran barang dan jasa yang diproduksi. Proses pembangunan ekonomi juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan (Susanti, 2000). Penduduk yang besar jumlahnya sebagai SDM yang potensial dan produktif didukung oleh kekayaan alam yang beraneka ragam merupakan

modal dasar dalam pembangunan suatu daerah, (Sasmito, 2017). Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang (BPS Provinsi Bali, 2014).

Keberadaan tenaga kerja pada suatu daerah merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi atau produksi. Peningkatan dari sisi permintaan atas produksi barang dan jasa akan mendorong peningkatan penggunaan input factor produksi tenaga kerja merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Dengan peningkatan kapasitas produksi maka akan menciptakan kesempatan kerja baru.

Tabel 1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Orang)

Kabupaten/ Kota	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	137,895	146,869	152,066	135,611	142,086	142,434	152,550	162,665	161,024
Tabanan	246,041	244,038	261,379	262,044	262,006	264,113	255,434	246,754	271,836
Badung	310,147	302,822	319,930	325,012	322,913	338,816	341,023	343,229	357,451
Gianyar	268,093	258,004	266,747	262,409	265,787	283,779	292,075	300,370	306,437
Klungkung	102,337	92,772	96,527	99,416	100,803	104,130	104,051	103,972	106,035
Bangli	132,684	139,202	141,782	140,122	143,857	135,709	139,134	142,559	146,608
Karangasem	224,945	232,241	238,928	242,195	240,451	241,983	240,363	238,742	253,469
Buleleng	332,432	332,090	348,514	345,423	333,594	345,326	351,717	358,107	371,368
Denpasar	422,784	411,120	426,602	429,844	461,135	468,515	485,212	501,909	516,642
Jumlah	2,177,358	2,159,158	2,252,475	2,242,076	2,272,632	2,324,805	2,361,556	2,398,307	2,490,870

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 1 menunjukkan penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2018 tetapi terjadi ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Perkembangan penyerapan tenaga pada tahun 2010 yang terendah terdapat di Klungkung sebesar 102,337 sedangkan yang tertinggi terdapat di Denpasar sebesar 422,784. Untuk tahun berikutnya Kabupaten Klungkung menjadi terendah dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan Kota Denpasar juga masih menjadi penyerapan tenaga kerja yang tertinggi. Ini yang menjadi permasalahan dalam pemerataan penyerapan tenaga kerja sehingga pemerintah harus mengupayakan agar menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memperluas penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (*Human Basic Needs*) yang tidak ada bedanya dengan sandang, pangan dan papan serta juga merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perekonomian suatu daerah. Penyerapan tenaga kerja dapat memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat suatu Negara dalam membangun perekonomiannya. Selain itu, indikator ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh perluasan kesempatan kerja yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat (Sunariani, 2014).

Untuk memberikan dan mengatur kebijakan tentunya pemerintah daerah perlu untuk mengumpulkan dana yang besar ,fungsinya agar pembangunan berkelanjutan nanti dapat optimal. Pembangunan yang optimal diharapkan akan membuat masyarakat sejahtera dan akan lebih baik jika pembangunan didukung dengan dana dan sumber daya manusia yang baik agar lebih efektif. Sumber dana ini diberikan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi daerah mampu menciptakan perubahan yang positif di daerah dalam hal kewenangan daerah lebih mandiri. Perubahan di antara pusat dan daerah semenjak adanya otonomi daerah memberi perubahan signifikan. Kebijakan-kebijakan tersebut memberi kesempatan untuk pemerintah daerah guna mengoptimalkan sumber dana mereka melalui pendapatan asli daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan bagiseluruh daerah untuk dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil. Dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk membentuk kemandirian atau mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Indonesia (Aprilia, 2015). Menurut Mardiasmo (2002), PAD memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Kusuma (2016) Potensi pendapatan asli daerah dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembagnunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya memberatkan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan pemerintah pusat (Devas, 2006).

Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah diupayakan dapat membantu proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Dalamagas et al, 2010). Desentralisasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita (Miranti et al, 2014). Diharapkan multiplier effect tercipta melalui pertumbuhan ekonomi (Suartha, dkk. 2017). Hal utama yang diusahakan oleh negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi (Kaur dan Singh, 2016).Peningkatan produksi barang dan jasa mengindikasikan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dan biasanyadiukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Taufik dan Eny, 2014).

Menurut Allingham dan Sandmo (2002) permasalahan yang sering terjadi adalah pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri guna mengatur aktivitas ekonomi, pemerintah daerah akan kurang efisiendalam pengeluaran namun mereka tidak mampu untuk meningkatkan penerimaan untuk

mendukung pengeluaran mereka. Menurut Manik (2014) dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah menguatkan sektor yang bisa menjangkau masyarakat kecil, sektor yang berkontribusi paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut Garcia (1998) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang baik ditandai dengan PDB provinsi yang meningkat. Salah satu aturan dalam implementasi desentralisasi fiskal adalah harus memperbesar kewenangan pajak dan peningkatan penerimaan daerah (Lin, 2000). Sumber pendapatan yang dipungut adalah pajak daerah dan retribusi daerah sebagai asal penerimaan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan bisa dikelola berdasarkan keadaan masing-masing daerah secara optimal. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, nantinya bisa membiayai daerah guna melaksanakan otonominya, juga mampu mandiri baik daerahnya sendiri. Sumber penerimaan yang diterima oleh daerah sebagian besar adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang didapatkan dari meninjau potensi-potensi yang maksimal dari daerah tersebut. Harapannya, sumber pendapatan dapat menolong pembiayaan daerah dalam menjalankan otonomi agar pemerintah sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis bahwa pendapatan asli daerah memediasi pengaruh sektor pariwisata, dan retribusi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian antar Kabupaten/Kota dikarenakan penulis melihat masih terjadinya ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari dokumen-dokumen yang terdapat pada instansi terkait seperti BPS Provinsi Bali. Menggunakan data data *time series* dan data *cross section*, maka penentuan sampel menggunakan pendekatan data panel. Menurut Winarno (2015:91), data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu atau *time series* dan data silang atau *cross section*. Data *time series* adalah data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu, sedangkan data *cross section* merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Adapun penggunaan data *time series* dalam penelitian ini yaitu pada periode waktu 9

tahun, dari tahun 2010-2018. Data *cross section* dalam penelitian ini yaitu dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan total sampel 9 kabupaten/kota. Dengan demikian, jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah sebanyak $n=81$.

Teknik analisis data yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan program SPSS. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independent terhadap variabel dependent dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.

Persamaan Substruktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan Substruktur II

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- X_1 = Sektor Pariwisata
- X_2 = Retribusi Daerah
- Y_1 = Pendapatan Asli Daerah
- Y_2 = Penyerapan Tenaga Kerja
- e_1, e_2 = Error
- $\beta_1 \dots \beta_5$ = koefisien jalur masing-masing variabel

Nilai Kekeliruan taksiran standar (*Standard error of estimate*), yaitu:

$$ei = \sqrt{1 - R^2} \dots \dots \dots (3)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan :

$$R^2_m = 1 - (P^2 e_1 P^2 e_2) \dots \dots \dots (4)$$

Dalam hal ini intepretasi terhadap R^2_m sama dengan intepretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi ei yang merupakan standard error of estimate dari model regresi. Uji Validitas koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan analisis regresi, menggunakan nilai p. Value dari uji t, yaitu pengujian koefisien regresi variabel yang dilakukan secara parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sendiri memberikan kontribusi yang tinggi dan terus menjadi sektor yang dominan terhadap PDRB dan perekonomian Bali. Adapun perkembangan PDRB Sektor Pariwisata menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Sektor Pariwisata menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2018

Kabupaten/ Kota	PDRB Sektor Pariwisata (miliar rupiah)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	717,8	813,4	920,0	1,074	1,327	1,488	1,651	1,879	2,003
Tabanan	1,675	1,898	2,188	2,631	3,324	3,716	4,025	4,493	4,887
Badung	5,296	5,948	7,186	8,807	10,815	12,287	13,454	15,111	16,564
Gianyar	2,193	2,494	2,869	3,414	4,270	4,808	5,411	6,186	6,814
Klungkung	352,6	399,9	476,8	579,1	746,5	841,0	956,4	1,121	1,227
Bangli	309,7	349,2	399,8	475,0	590,5	643,1	708,8	802,4	874,1
Karangasem	575,4	643,4	753,5	910,8	1,150	1,299	1,454	1,633	1,801
Buleleng	2,032	2,313	2,661	3,172	3,976	4,433	4,952	5,625	6,155
Denpasar	4,770	5,404	6,519	7,870	9,908	11,024	12,065	13,573	14,737
Jumlah	17,922	20,265	23,975	28,936	36,111	40,543	44,681	50,428	55,065

Sumber : BPS Provinsi Bali 2019

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh Tabel 2 PDRB sektor pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara perlahan dan terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2018. Pada tahun 2010 jumlah PDRB sektor pariwisata sejumlah 17,922 miliar rupiah dan sampai tahun 2018 telah mencapai sejumlah 55,065 miliar rupiah.

Nilai dan kontribusi PDRB sektor pariwisata dapat terus bertambah karena diprediksi kunjungan wisatawan pada tahun-tahun berikutnya akan meningkat. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa PDRB sektor pariwisata terendah terdapat di Kabupaten Bangli, sedangkan PDRB sektor pariwisata terbesar masih terdapat di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Besarnya PDRB sektor pariwisata tidak terlepas dari banyaknya industri pariwisata yang ada sehingga menarik banyak kunjungan wisatawan dan lebih banyak pendapatan dari industry pariwisata yang diterima, selain meningkatkan pendapatan, sektor pariwisata juga merupakan salah satu industri yang terbukti mampu berkontribusi dalam peningkatan devisa dan juga memperluas penciptaan lapangan pekerjaan (Booth, 1990), hal ini sejalan dengan (Cohen, 1984), dimana perkembangan pariwisata berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan retribusi daerah dan pajak daerah bertujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, yang dipakai dalam menyelenggarakan otonomi daerah tersebut, yang diharapkan

mempunyai kemampuan nyata serta bertanggung jawab dan mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemampuan ini juga diharapkan berasal dari kemampuan mengelola penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah melalui aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang diberlakukan sehingga terjadi peningkatan penerimaan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menjalankan fungsi dan kewajiban pemerintah daerah guna pelaksanaannya sebagai kewenangan fiskal, daerah wajib dapat menyadari potensi dan mengelola sumber-sumber daya yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah diuntut untuk lebih paham dalam mengenali dan mengkaji asal muasal dari keuangan guna memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah serta pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber PAD berasal dari retribusi daerah, pajak daerah dan juga dari sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut demi majunya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota	Retribusi Daerah (miliar rupiah)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	8,1	4,5	6,7	7,9	9,1	9,1	9,8	12,9	9,6
Tabanan	16,5	20,5	28,5	40,3	39,1	39,1	43,3	21,8	29,2
Badung	42,4	35,8	68,9	90,4	80,0	80,0	104,7	101,1	135,9
Gianyar	21,2	26,0	30,4	31,8	30,6	30,6	70,1	35,6	49,4
Klungkung	20,1	26,7	18,6	10,5	20,7	20,7	21,8	26,5	22,7
Bangli	7,7	12,6	10,1	11,2	16,1	16,1	22,0	28,2	21,3
Karangasem	8,2	7,9	8,4	11,9	11,4	11,4	12,0	11,2	13,1
Buleleng	10,3	11,1	13,1	14,8	13,7	13,7	18,3	20,4	19,0
Denpasar	26,1	24,4	43,7	47,8	48,7	48,7	46,2	45,4	30,9
Jumlah	160,9	169,8	228,8	267,2	269,8	269,8	348,6	303,7	331,4

Sumber : BPS Provinsi Bali 2019

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh Tabel 3 Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara perlahan dan terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2018. Pada tahun 2010 jumlah retribusi daerah sejumlah 160,9 miliar rupiah dan sampai tahun 2018 telah mencapai sejumlah 331,4 miliar rupiah. Dimana besaran retribusi daerah yang terjadi 2010 sampai 2018 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tidak merata.

Sumber pendapatan yang dipungut adalah pajak daerah dan retribusi daerah sebagai asal penerimaan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan bias dikelola berdasarkan keadaan masing-masing daerah secara optimal. Sumber penerimaan yang diterima oleh daerah sebagian besar adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang di dapatkan dari meninjau potensi-potensi yang maskimal dari daerah tersebut. Harapannya, sumber pendapatan dapat menolong pembiayaan daerah dalam menjalankan otonomi agar pemerintah sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal di Negara Indonesia berusaha untuk mempromosikan pemerataan dengan mengatasi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal dan dengan memberikan pemerintah pusat dan kabupaten-kabupaten dengan insentif untuk pengembangan pembangunan (Irawan, 2015). Adapun perkembangan pendapatan asli daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2010 – 2018

Kabupaten/ Kota	Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	34,3	41,3	46,4	68,4	70,0	70,0	88,2	119,7	126,4
Tabanan	116,8	141,0	183,2	255,4	224,1	224,1	270,7	327,4	363,3
Badung	979,1	1,406	1,872	2,279	2,475	2,475	2,938	3,823	4,555
Gianyar	153,5	209,5	261,2	319,6	351,2	351,2	1,693	448,1	770,2
Klungkung	31,3	40,7	48,5	67,4	84,4	84,4	121,9	124,0	186,9
Bangli	16,2	22,9	40,7	56,6	66,0	66,0	92,0	117,5	122,6
Karangasem	62,6	129,5	130,2	168,6	202,7	202,7	233,6	233,6	200,3
Buleleng	86,9	109,1	129,0	160,3	209,2	209,2	273,6	251,8	335,5
Denpasar	260,4	424,9	511,3	658,9	644,1	644,1	715,4	805,3	940,1
Jumlah	1,741,2	2,525,6	3,223	4,034,7	4,327,7	4,327,7	6,426,7	6,250,8	7,601

Sumber: BPS, Provinsi Bali, 2019

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara perlahan dan terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2018. Pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1,741,7 miliar rupiah dan sampai tahun 2018 telah mencapai sejumlah 7,601,4 miliar rupiah.

Keberadaan tenaga kerja pada suatu daerah merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi atau produksi. Peningkatan dari sisi permintaan atas produksi barang dan jasa akan mendorong peningkatan penggunaan input faktor produksi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Dengan peningkatan kapasitas produksi maka akan menciptakan kesempatan kerja baru. Perkembangan penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2010-2018

Kabupaten/Kota	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	137,8	146,8	152,0	135,6	142,0	142,4	152,5	162,6	161,0
Tabanan	246,0	244,0	261,3	262,0	262,0	264,1	255,4	246,7	271,8
Badung	310,1	302,8	319,9	325,0	322,9	338,8	341,0	343,2	357,4
Gianyar	268,0	258,0	266,7	262,4	265,7	283,7	292,0	300,3	306,4
Klungkung	102,3	92,7	96,5	99,4	100,8	104,1	104,0	103,9	106,0
Bangli	132,6	139,2	141,7	140,1	143,8	135,7	139,1	142,5	146,6
Karangasem	224,9	232,2	238,9	242,1	240,4	241,9	240,3	238,7	253,4
Buleleng	332,4	332,0	348,5	345,4	333,5	345,3	351,7	358,1	371,3
Denpasar	422,7	411,1	426,6	429,8	461,1	468,5	485,2	501,9	516,6
Jumlah	2,177,3	2,159,1	2,252,4	2,242,0	2,272,6	2,324,8	2,361,5	2,398,3	2,490,8

Sumber: BPS, Provinsi Bali 2019

Berdasarkan pada Tabel 5 mengenai penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di kabupaten/kota Provinsi Bali dari tahun 2010 sampai 2018 berfluktuasi, sehingga itu akan menjadi ketimpangan pemerataan untuk penduduk bekerja. Terlihat pada tahun 2010 Kota Denpasar memperoleh nilai tertinggi penduduk yang bekerja sebesar 422,7 orang, sedangkan yang terendah yaitu kabupaten klungkung sebesar 102,3 orang. Untuk tahun berikutnya masih kabupaten klungkung menjadi terendah penduduk yang bekerja. Sedangkan pada tahun berikutnya kota Denpasar juga masih menjadi penduduk yang bekerja tertinggi. Ini menjadi permasalahan dalam pemerataan penduduk yang bekerja sehingga pemerintah harus mengupayakan agar menciptakan lapangan pekerjaa sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.

Analisi Jalur (Path Analysis)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sektor pariwisata dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Koefisien jalur

pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode regresi (Ordinary Least Square-OLS) menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 22. Hasil analisis dapat ditunjukkan seperti pada persamaan struktural sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Jalur Model Struktural I

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-420184.657	52373.024		-8.023	.000
Sektor Pariwisata	.026	.015	.124	1.751	.084
Retribusi Daerah	28.190	2.404	.830	11.726	.000

Sumber: Data diolah, 2020

$$\text{Persamaan 1 : } Y_1 = 0.124 X_1 + 0.830 X_2$$

Pengaruh langsung sector pariwisata (X₁) terhadap pendapatan asli daerah (Y₁) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.124 dan nilai *probabilitas* sebesar 0.084 > 0,05 berarti H₀ diterima H₁ ditolak, artinya sector pariwisata berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya sector pariwisata maka pendapatan asli daerah semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Cohen (1984) bahwa sektor pariwisata dapat berpengaruh terhadap perekonomian, yaitu memberikan dampak terhadap pemerintah, khususnya pemerintah daerah

dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pertama adalah meningkatnya pendapatan pada sektor pariwisata, kemudian meningkatnya pajak hotel dan restoran, retribusi obyek wisata, retribusi jasa hiburan, retribusi jasa parkir, dan lain-lain.

Pengaruh langsung retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar 0.830 dan nilai probabilitas $0.000 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berpengaruh signifikan dapat diartikan bahwa apabila Retribusi Obyek Wisata meningkat maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2011), yang meneliti pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah dan anggaran pembangunan kabupaten Gianyar tahun 1990-2010, yang menyatakan bahwa pendapatan retribusi obyek wisata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ana Pertiwi (2014), bahwa pendapatan retribusi obyek wisata berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan kata lain, adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para pejabat pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pajak dan retribusi daerah yang diterima dapat disalurkan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pengaruh Sektor Pariwisata, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh Sektor Pariwisata, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja secara langsung yang dilakukan dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22 maka hasil uji regresi disajikan dalam (Lampiran 3). Hasil pengujian menunjukkan model persamaan struktural 2 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 7. Hasil Analisis Jalur Model Struktural II

Model	Unstandardized B	Coefficien ts Std. Error	Standardiz Coefficients	t	Sig.
			Beta		
1 (Constant)	162113.919	7887.966		20.552	.000
Sektor Pariwisata	.015	.002	.515	8.789	.000
Retribusi Daerah	.587	.445	.126	1.318	.192
PAD	.051	.013	.370	4.024	.000

Sumber: Data diolah, 2020

$$Y_2 = 0.515 X_1 + 0.126 X_2 + 0.370 Y_1$$

Pengaruh sektor pariwisata (X₁) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y₂) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.515 dan nilai probabilitas $0.000 < 0.05$ ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya sector pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya sector pariwisata maka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.

Hal ini memiliki arti bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variabel PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini didukung oleh penelitian Ruliansyah (2012) yang berjudul “Analisis Hubungan Antara PDRB, realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan

Kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur”. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang dapat dicerminkan melalui pertumbuhan PDRB yang semakin meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah proyek, seperti proyek UMKM Pengaruh PDRB dan Upah Minimum dan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Sehingga terdapat pengaruh langsung yang positif antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja

Pengaruh retribusi daerah (X_2) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.126 dan nilai probabilitas $0.192 > 0.05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya retribusi daerah maka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Ju Kumala (2018) yang memperoleh kesimpulan bahwa retribusi daerah berpengaruh dan signifikan penyerapan tenaga kerja pada Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 1996-2016. Hal ini menunjukkan hubungan searah antara retribusi daerah dengan tenaga kerja pada Kota Palangka Raya. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang dapat berperan dalam meningkatkan pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Hasil penelitian juga memperkuat

penelitian dari Putriani (2016) yang mengemukakan naik turunnya retribusi daerah secara langsung akan mempengaruhi total pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba, meskipun masih terdapat komponen pendapatan Asli Daerah Lainnya namun retribusi daerah memberi sumbangsih yang besar dan berpengaruh terhadap total PAD Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lucky (2011), Putri dan Rahayu (2015), serta Dewi dan Budhi (2018).

Pengaruh pendapatan asli daerah (Y_1) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.370 dan nilai probabilitas $0.000 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.

Menurut penelitian sebelumnya bahwa hubungan positif antara pengaruh PAD terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Tengah. Hasil Estimasi persamaan regresi selama tahun pengamatan tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa pengaruh PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan (Yulia Pangastuti, 2015). Hasil ini sejalan dengan Siti Hodijah (2017) yang menyatakan bahwa besarnya koefisien korelasi antara PAD dengan kesempatan kerja (KK) adalah 0,834, artinya terdapat korelasi yang

sangat kuat dan positif antara PAD dan kesempatan kerja di Provinsi Jambi.

Menurut Warsito (2001) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berdasarkan hasil estimasi EViews menjelaskan bahwa hubungan antara PAD dengan penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa tengah memiliki hubungan positif. Hal yang mendasari hubungan tersebut yakni ketika PAD meningkat setiap tahun maka PAD tersebut bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur khusus nya upaya peningkatan kesempatan kerja

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar

Mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah variance variabel Pendapatan Asli Daerah yang tidak dijelaskan oleh Sektor Pariwisata dan Retribusi Daerah dihitung dengan menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0.872} = 0.357$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan variance variabel Penyerapan Tenaga Kerja yang tidak dijelaskan oleh variabel Sektor Pariwisata, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah maka menggunakan rumus :

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0.917} = 0.288$$

Pemeriksaan Validitas Model

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0.357)^2 - (0.288)^2 \\ &= 0.98 \end{aligned}$$

Keterangan:

R^2_m : Koefisien determinasi total
 e_1, e_2 : Nilai kekeliruan taksiran standar

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 98 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 98 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 2 persen.

Pengaruh Sektor Pariwisata Dan Retribusi Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pengujian uji sobel atau pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan secara parsial untuk melihat Pengaruh Sektor Pariwisata Dan Retribusi Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan sebagai berikut.

Pengaruh tidak langsung Sektor Pariwisata (X1) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y2) melalui Pendapatan Asli Daerah (Y1).

Oleh karena hasil analisis hubungan sector pariwisata terhadap

pendapatan asli daerah tidak signifikan maka artinya pendapatan asli daerah bukan merupakan variabel yang memediasi sector pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain sector pariwisata berpengaruh secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja tidak melalui pendapatan asli daerah.

Pengaruh tidak langsung Retribusi Daerah (X2) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y2) melalui Pendapatan Asli Daerah (Y1).

Statistik Uji

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_2^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_5^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(0.051^2)(2.404^2) + (28.190^2)(0.013^2)}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0.386$$

Menghitung nilai z-Hitung

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$z = \frac{(28.190)(0.051)}{0.386}$$

Oleh karena z hitung sebesar $3.72 > 1.96$ artinya pendapatan asli daerah merupakan variabel yang memediasi retribusi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain retribusi daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pendapatan asli daerah.

SIMPULAN

- 1) Sector pariwisata berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010-2018, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010-2018.

- 2) Sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010-2018, sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010-2018.
- 3) Pendapatan asli daerah memediasi secara parsial pengaruh retribusi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pendapatan asli daerah tidak memediasi secara parsial pengaruh sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010-2018.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah sebaiknya, pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dalam dunia kerja kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat.
- 2) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pariwisata yang ada di Bali serta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

REFERENSI

- Agustina, I Made., dan Kartika, I Nengah. 2017. Pengaruh Tenaga Kerja, Modal Dan Bahan Baku Terhadap Produksi Industri Kerajinan Patung Kayu Di Kecamatan Tegallalang. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 6, No. 7, Hal : 1302-1331
- Al-Ababneh, Mukhles. 2013. Service Quality And Its Impact On Tourist Satisfaction. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*. 164 April 2013 Vol 4, No 12.
- Ana Pertiwi, Ni Luh Gede. 2014. Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [3] : 115 – 123
- Asmuruf, Makdalena F., Vikie A. Rumat, dan George M.V. Kawung. 2015. Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15 No. 05, Hal: 727-737.
- Caraka, Rezzy Eko. 2019. Pemodelan Regresi Panel pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], p. 55-61, feb. 2019. ISSN 2303-0186.
- Dewi, Ju Kumala. Made Kembar Sri Budhi. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Analisis, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 7.6 (2018): 1695-1722
- Eny, T. Dan. (2014). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7.
- Garcia, Jorge dan Lana Soelistianingsih. 1998. Why Do Differences in Provincial Incomes Persist in Indonesia?. *Bulletin of Indonesia Economics Studies*. Vol. 34 No. 1
- Gustav, Ranis. 2006. “Desentralisasi in Indonesia”. *Bulletin of Indonesia Economics Studies*.
- Ningsih, Ni Made Cahya; Indrajaya, I Gst. Bagus. Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.L.], Nov. 2015. Issn 2303-0186.
- Jaya, Gde Bhaskara Perwira. dan A.A Bagus Putu Widanta. 2014. Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 5, Hal: 201-208

- Vehicle Taxation in Indonesia. *Bulletin of Indonesia Economics Studies*. Vol. 29 No. 3
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- NINGSIH, Ni Made Cahya; INDRAJAYA, I Gst. Bagus. Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Nurfiat, Nashahta Ardhiaty; Rustariyuni, Surya Dewi. 2018. Pengaruh Upah Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kota Denpasar. *PIRAMIDA*, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 34-48, july 2018. ISSN 2685-788X.
- Pramartha, Agung dan Luh Putu Aswitari. 2018. Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7 [8]: 1767-1795
- Priyono, Nuwun. 2016. Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010). *Jurnal Universitas Tidar*. Hal: 13-25
- Ruliansyah. 2012. Analisis Hubungan PDRB, Realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan Kesempatan Kerja di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman*.
- Sabrina, Nina., dan Irma Mudzhalifah. 2018. Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Pariwisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*. Vol 3, No. 2, Hal: 464-473
- Taufik, Muhammad; Rochaid, Eny; Fitriadi, Fitriadi. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Tangkilisan, Lanny Christi., Daisy.S. M. Engka, dan Krest D. Tolosang. 2019. Pengaruh Jumlah Wisatawan Asing Dan Domestik Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sulawesi Utara Melalui Tingkat Hunian Hotel Sebagai Intervening Variabel (Studi Pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007- 2016). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 19 No. 01. Hal: 68-77